

**MAPING KINERJA PAD, EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAERAH SENDIRI (PDS)**

**DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN**

**PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH**

**( Studi pada Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)**

**TESIS**

**Oleh :**

**FITRIA LUSPITA SARI**

**07206045**



**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2010**



**MAPING KINERJA PAD, EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAERAH  
SENDIRI (PDS) DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN SERTA  
HUBUNGANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  
(Studi pada Pemda Kab/Kota di Sumatera Barat)**

Oleh :  
FITRIA LUSPITA SARI  
07206045

Dibawah Bimbingan  
(Dr. Suhairi, M.Si,Ak dan Drs. A.Rizal Putra, M.Si,Ak)

**RINGKASAN**

Tujuan penelitian ini adalah menyusun peta (*mapping*) kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terutama berdasarkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu penelitian ini juga berkenaan dengan analisis terhadap hubungan yang terjadi antara Penerimaan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi. Indikator penerimaan daerah yang diuji berdasarkan pada tingkat Efektivitas Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dan tingkat kemandirian keuangan.

Efektivitas Penerimaan Daerah sendiri dihitung berdasarkan persentase realisasi PDS dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat kemandirian keuangan dihitung berdasarkan persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah selain PAD.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai PDRB 2005-2007, dan data APBD tahun 2005-2007 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peta kinerja Pendapatan Asli Daerah berdasarkan rasio elastisitas, share dan growth dengan menggunakan metode kuadran, untuk tahun 2006 hanya dua kabupaten/kota yang berada pada kuadran I (kuadran dengan tingkat kemampuan keuangan terbaik), yaitu Kota Bukittinggi dan Kota Solok. Sebelas daerah lainnya berada pada kuadran II, tiga daerah di kuadran III dan empat daerah di kuadran IV. Sementara pada tahun 2007 tidak satu pun daerah yang berada di kuadran I. Kondisi ini menunjukkan terjadi penurunan kemampuan keuangan daerah jika dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerahnya. Kedua, secara empiris menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PDS dan Kemandirian Keuangan tidak memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah, namun memiliki hubungan yang sebaliknya yaitu negatif. Hasil ini memberi arti bahwa semakin besar daerah memperoleh sumber-sumber pendapatan yang didapat dari pajak yang dipungut dari masyarakat maka akan semakin memperburuk keadaan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Kata Kunci : Kinerja PAD, Efektivitas PDS, Tingkat Kemandirian Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi Pemerintahan Daerah dan Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan titik awal berjalannya Otonomi Daerah. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kedua paket undang-undang otonomi daerah itu digantikan dengan 2 (dua) buah undang-undang baru yaitu UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004.

Tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah, menurut Mardiasmo (2002:3) adalah wajar karena berpijak dari dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Kedua, arahan dan pemenuhan akan tuntutan terhadap peraturan yang terlalu besar oleh pemerintah pusat menyebabkan daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan tersebut sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas.



Sedangkan Halim (2007:1) menjelaskan pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri dan di luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Di lain pihak keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing setiap Negara, termasuk daya saing Pemerintah Daerah (Pemda). Daya saing Pemda ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya, peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui Otonomi Daerah.

Kebijakan desentralisasi (Otonomi) ini menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang dimiliki menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan lain pemberian otonomi daerah menurut Hirawan (1991) yang dikutip Wahyuni (2006), adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu membiayai keuangannya

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka *mapping* kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode kuadran, untuk tahun 2006 terdapat dua daerah yang berada pada kuadran I sebagai kuadran dengan kondisi keuangan yang baik yaitu kota Bukittinggi dan kota solok, tiga belas daerah memiliki kinerja PAD yang sedang yang ditunjukkan dengan posisi mereka pada kuadran II dan III, sementara itu sisanya sebanyak empat daerah lagi berada pada kondisi kemampuan keuangan yang buruk yang ditunjukkan dengan posisi pada kuadran IV yaitu kota Padang Panjang, kota Sawahlunto, kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Tanah Datar. Untuk tahun 2007, tidak satupun daerah yang ada di Sumatera Barat berada pada kondisi keuangan yang baik atau berada pada posisi kuadran I, lebih banyak daerah-daerah tersebut berada pada kondisi keuangan yang sedang dan buruk jika kondisi ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Variabel efektivitas PDS tidak memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, terlihat dari hasil koefisien korelasi yang bertanda negatif dan  $H_0$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa sekalipun suatu daerah mampu mencapai realisasi targetnya hingga ke tahap yang sangat efektif, hal tersebut tidak akan memberikan dampak sama sekali pada pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera Barat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (studi pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Agustino, Erlangga. 2008. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya*. [Google.com](#). Download 1 April 2009.
- Amran, M. Anshar. 2008. *Definisi dan Jenis-jenis Penelitian*. [Google.com](#). Download 14 Juli 2009.
- Bachtiar, Nurzaman. 1992. *Otonomi dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, volume IV No. 1 dan 2, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik (suatu pengantar)*. Jakarta : Erlangga.
- BPS. 2007. *PDRB Kabupaten/Kota di Sumbar atas Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2003-2007*. Badan Pusat Statistik. Padang.
- Deddy. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Bappenas – Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. [Google.Com](#) (online), download 04 Januari 2009.
- Dwirandra, A.A.N. 2007. *"Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali*. [Http://tkp2e-org/dokum/kajian](http://tkp2e-org/dokum/kajian), download 04 Januari 2009.
- Ghozali. Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati. Damodar. 1995. *Basic Econometrics, 3<sup>rd</sup> Edition*. Mc Grawhill. New York
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Haryanto, Joko Tri. 2006. *Kemandirian daerah sebuah perspektif dengan metode path analysis*. [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id), download 1 April 2009.
- Jaya, Wihana Kirana. 1999. *Analisis Potensi Keuangan Daerah Dengan Pendekatan Makro*. PPPEB UGM, Yogyakarta.